

Chain Reaction Research merupakan koalisi yang terdiri dari Aidenvironment, Profundo dan Climate Advisers.

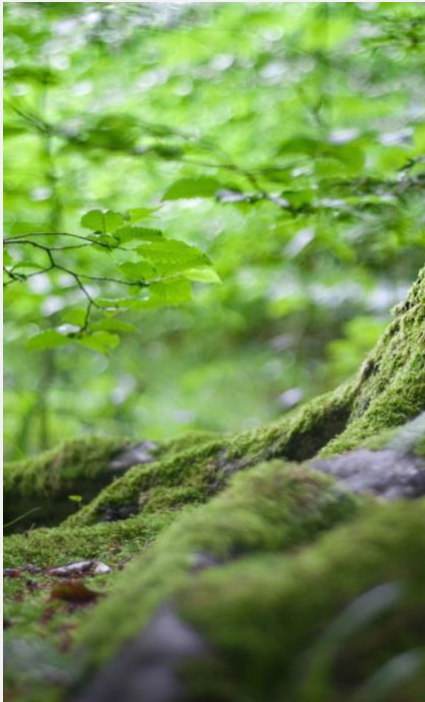
**Kontak:**

[www.chainreactionresearch.com](http://www.chainreactionresearch.com);  
[info@chainreactionresearch.com](mailto:info@chainreactionresearch.com)

**Penulis:**

Albert ten Kate, Aidenvironment  
Barbara Kuepper, Profundo  
Matt Piotrowski, Climate Advisers

Dengan kontribusi dari:  
Tim Steinweg, Aidenvironment  
Gerard Rijk, Profundo



# Kebijakan NDPE Mencakup 83% Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit; Sedangkan Pelaksanaannya Mencapai 78%

**April 2020**

Perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit merupakan titik hambatan strategis di rantai pasokan global. Sejak tahun 2014, beberapa perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit besar telah mengadopsi kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (*No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE), sebuah instrumen swasta yang paling kuat untuk memutus hubungan antara deforestasi dan kelapa sawit. Perusahaan pengolahan berkomitmen pada kebijakan NDPE yang mencakup areal perkebunan milik sendiri maupun areal perkebunan pemasok pihak ketiganya. Mekanisme pasar tersebut berfungsi paling baik ketika seluruh pelaku industri melaksanakan komitmennya. Namun, beberapa perusahaan pengolahan yang tidak patuh tetap menjual minyak kelapa sawit yang tidak berkelanjutan ke dalam pasar.

## Temuan Utama:

- Per bulan April 2020, kebijakan NDPE mencakup 83 persen kapasitas pengolahan minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia. Pada bulan [November 2017](#), persentasenya hanya sebesar 74 persen. Peningkatan ini sebagai akibat dari enam grup perusahaan berkapasitas pengolahan besar yang menerapkan kebijakan NDPE.
- Oleh karena pelaksanaan yang lemah, efektivitas cakupan NDPE berkurang menjadi 78 persen. Delapan dari dua puluh lima penyulingan terbesar di Indonesia dan Malaysia masih menjadi bagian dari pasar 'leakage'.
- Lima perusahaan pengolahan paling besar yang masih bermain di *leakage market* di Indonesia dan Malaysia adalah Salim Group, BEST Industry Group, Tunas Baru Lampung, Darmex Agro, dan Wings Group. Di India, negara pengimpor minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia, terdapat tiga perusahaan pengolahan yang termasuk dalam "leakage", yakni: Emami Agrotech, Patanjali Ayurved dan Gokul Agro Resources.
- Pemerintah Indonesia menawarkan jalan keluar bagi perusahaan pengolahan *leakage* lokal untuk lolos dari persyaratan pasar NDPE melalui pasar biosolar. Sebelum terjadinya pandemic COVID-19, sesuai rencana, 18 persen produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada tahun 2020 ditetapkan untuk biosolar. Perusahaan pengolahan *leakage*, Darmex Agro, Permata

Hijau Group, BEST Industry Group dan Tunas Baru Lampung diharapkan untuk menghasilkan 19 persen dari produksi biosolar tersebut.

- **Kebijakan NDPE, bersama dengan tindakan pemerintah dan rendahnya harga minyak kelapa sawit, telah menyebabkan laju deforestasi terkait perkebunan kelapa sawit menjadi lebih rendah.** Di Indonesia, 16 dari 21 perkebunan kelapa sawit terbesar mematuhi kebijakan NDPE terkait kegiatan pembukaan hutan dan lahan gambut. Namun demikian, beberapa perusahaan perkebunan masih melakukan deforestasi untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

## Minyak kelapa sawit yang bebas deforestasi sangat tergantung pada pelaksanaan kebijakan pembelian yang berkelanjutan oleh perusahaan pengolahan

Per tahun 2020, hampir semua perusahaan besar yang terlibat dalam rantai pasokan minyak kelapa sawit global telah berkomitmen pada **No! Deforestasi, No! Gambut, No! Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE))**. Perusahaan besar tersebut termasuk perusahaan perkebunan, perusahaan dagang, perusahaan barang konsumen, dan lembaga keuangan. Dengan adanya tekanan dari LSM dan para pembeli, pemimpin pasar Wilmar International menjadi perusahaan pertama yang berkomitmen pada kebijakan NDPE pada [akhir tahun 2013](#).

**Rantai pasokan minyak kelapa sawit mempunyai bentuk khas yang menyerupai jam pasir.** Beberapa lusin perusahaan pengolahan membeli bahan baku dari ribuan pabrik minyak kelapa sawit, dan selanjutnya menjual hasil pengolahannya kepada banyak perusahaan barang konsumen. Fungsi perusahaan pengolahan tersebut adalah mengolah minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil (CPO)*) menjadi berbagai produk murni sebagai bahan baku makanan, kosmetik dan bahan bakar. Sebagian besar perusahaan pengolahan mengandalkan pasokan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit pihak ketiga. Selama ini, NDPE berhasil karena perusahaan pengolahan mempunyai pengaruh ekonomi atas perusahaan perkebunan kelapa sawit. Upaya perusahaan pengolahan untuk melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam NDPE juga meningkatkan kesadaran akan dampak lingkungan dan sosial. Ketika perusahaan perkebunan menolak untuk mematuhi NDPE, maka perusahaan pengolahan dapat membekukan pembelian dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan perkebunan kelapa sawit mengalami [risiko akses pasar](#).

Kebijakan NDPE mencakup komitmen pada hal-hal sebagai berikut: Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan atau *Free Prior and Informed Consent (FPIC)* bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya; nol pembakaran; pencegahan kondisi kerja buruk; dan pelestarian areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT), areal Stok Karbon Tinggi (SKT) dan lahan gambut. [Kerangka Akuntabilitas](#), yang disusun oleh LSM-LSM yang bergerak di bidang konservasi, menyediakan garis pedoman untuk pelaksanaan NDPE.

**Menimbang posisi pasarnya, maka perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit merupakan kunci suksesnya NDPE.** Indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators (KPI)*) untuk pelaksanaan NDPE oleh perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit adalah sebagai berikut:

- **Transparansi rantai pasokan.** Keterlacakan atas seluruh bahan baku di tingkat pabrik minyak kelapa sawit, lebih baik lagi di tingkat [perkebunan](#), dan penerbitan daftar pabrik termasuk titik koordinat dan nama perusahaan induk.
- **Sistem pengaduan operasional.** Penerbitan mekanisme pengaduan perusahaan, serta penerbitan setiap pengaduan, tindakan yang diambil, dan [hasilnya](#).
- **Engagement** (proses pelibatan) dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak patuh pada kebijakan NDPE, dan pembekuan pembelian apabila proses pelibatan tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
- **Protokol untuk masuk kembali** untuk perusahaan pemasok yang pernah dibekukan dari rantai pasokan karena tidak patuh pada kebijakan NDPE.
- **Menunjukkan kemajuan** melalui pelaporan secara rutin.

Untuk laporan ini, CRR melakukan penilaian terhadap perusahaan pengolahan yang mempunyai kebijakan NDPE berdasarkan pelaksanaannya atas dua KPI utama, yaitu: 1) Transparansi rantai pasokan; dan 2) sistem pengaduan operasional. KPI mengenai *engagement* atau kegiatan pelibatan dan [membuktikan adanya kemajuan](#) umumnya timbul dengan sendirinya dari pembaruan informasi rutin perusahaan pengolahan mengenai pemasok dan pengaduan. KPI kelima, yakni [protokol masuk kembali](#), belum dikembangkan oleh semua perusahaan pengolahan utama.

## Perusahaan pengolahan yang menghasilkan 78 persen dari total kapasitas produksi melaksanakan kebijakan NDPE; sedangkan 5 persen kekurangan tindakan NDPE yang berarti

Pada tahun [2017](#), kebijakan NDPE mencakup 74 persen kapasitas pengolahan di Indonesia dan Malaysia, di mana sebagian besar pabrik pengolahan berada. Per bulan April 2020, persentase ini meningkat menjadi 83 persen. Enam grup perusahaan berkapasitas pengolahan besar, yaitu: [HSA Group/Pacific Inter-Link](#), [Nisshin Oillio](#), [IFFCO](#), [BLD Plantation](#), [Wings Group](#) dan [Kwantas Corporation](#) telah menerapkan kebijakan NDPE sejak bulan November 2017. Beberapa perusahaan tersebut – HSA Group/Pacific Inter-Link, Nisshin Oillio, IFFCO dan BLD Plantation – juga terbuka tentang rantai pasokannya dan mempunyai sistem pengaduan operasional. IFFCO mengambil tindakan dengan [membekukan](#) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tetap melanggar, yaitu Sawit Sumbermas Sarana dan Austindo Jaya Nusantara, dari rantai pasokannya pada tahun 2018.

Sekarang, sebelas perusahaan pengolahan yang paling besar di Indonesia dan Malaysia mempunyai kebijakan NDPE, dengan Salim Group masih kurang dalam implementasinya. Saat ini, 78 persen produksi minyak kelapa sawit dihasilkan oleh perusahaan pengolahan yang transparan mengenai rantai pasokannya dan mempunyai sistem pengaduan operasional. Delapan dari 25 perusahaan penyulingan terbesar di Indonesia dan Malaysia masih menjadi bagian dari pasar *leakage* karena tidak memiliki kebijakan NDPE atau masih kurang dalam pelaksanaannya.

Baru-baru ini, beberapa pelaku usaha yang terlibat *leakage market* meningkatkan kapasitas pengolahannya atau membuka pabrik pengolahan baru. Perusahaan pengolahan *leakage* tersebut adalah:

Darmex Agro (terkait dengan melonjaknya industri biosolar di Indonesia), [Rimbunan Hijau](#) dan salah satu perusahaan [yang terkait dengan](#) Sawit Sumbermas Sarana.

**Gambar 1: 25 perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia/Malaysia per tahun 2020**

Perusahaan pengolahan	Kapasitas pengolahan minyak kelapa sawit di Indonesia/Malaysia (juta ton/tahun)	kebijakan NDPE?	Pelaksanaan NDPE?	
			Transparansi rantai pasokan	Sistem pengaduan operasional
Wilmar International	18,9	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
Musim Mas	7,5	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
Golden Agri-Resources	6,1	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
Royal Golden Eagle (Apical)	4,2	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
Mewah International	3,2	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
FGV Holdings (Felda)	2,5	<a href="#">Ya</a>	No	No
Sime Darby	2,5	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
HSA Group/Pacific Inter-Link	2,4	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
IOI Group	2,4	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
Permata Hijau Group	2,2	<a href="#">Ya</a>	No	No
Grup Salim	1,7	<a href="#">Ya</a>	No	No
BEST Industry Group	1,3	No	No	No
Kuala Lumpur Kepong (KLK)	1,4	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
Tunas Baru Lampung	1,3	No	No	No
Louis Dreyfus Company	1,2	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
Darmex Agro	1,2	No	No	No
Astra Agro Lestari	1,1	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
Nisshin OilliO	1,0	<a href="#">Ya</a>	<a href="#">Ya</a>	<a href="#">Ya</a>
Wings Group	0,9	<a href="#">Ya</a>	No	No
Gunawan family (Incasi Raya)	0,9	No	No	No
IFFCO	0,9	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
First Resources	0,9	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
BLD Plantation	0,8	<a href="#">Ya</a>	Ya	Ya
Kwantas Corporation	0,7	<a href="#">Ya</a>	No	No
PT Perkebunan Nusantara (PTPN)	0,7	No	No	No
Perusahaan pengolahan lain	10,8	8,1 Tidak; 2,7 Ya	8,7 Tidak; 2,1 Ya	

Perusahaan pengolahan	Kapasitas pengolahan minyak kelapa sawit di Indonesia/Malaysia (juta ton/tahun)	kebijakan NDPE?	Pelaksanaan NDPE?	
			Transparansi rantai pasokan	Sistem pengaduan operasional
<b>Total kapasitas pengolahan minyak kelapa sawit</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>

Sumber: Situs web perusahaan, sumber industri.

Untuk usaha patungan 50:50, maka separuh kapasitas ditetapkan untuk masing-masing grup perusahaan.

Lima perusahaan pengolahan *leakage* terbesar di Indonesia/Malaysia dijelaskan di bawah ini. Perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan pengolahan “*leakage*” karena tidak mempunyai kebijakan NDPE, atau karena pelaksanaan NDPEnya masih kurang akibat tidak adanya transparansi rantai pasokan maupun sistem pengaduan operasional. Reputasi industri minyak kelapa sawit akan tetap lemah selama perusahaan tersebut belum meningkatkan kinerjanya dalam pembelian bahan baku yang berkelanjutan.

Anak perusahaan **Grup Salim**, yaitu Indofood Agri Resources mempunyai kapasitas pengolahan sebesar 1,7 juta ton per tahun. Hasil produksi CPO perusahaan sendiri mencapai 840.000 ton pada tahun 2019. Indofood menyatakan bahwa 23 persen CPO yang digunakan di pabrik pengolahannya berasal dari pihak ketiga. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengakhiri keanggotaan Indofood pada bulan Februari 2019, setelah perusahaan tersebut menolak untuk menanggapi pengaduan RSPO mengenai dugaan pelanggaran hak pekerja. Indofood mempunyai kebijakan NDPE, namun tidak menerbitkan daftar nama pabrik pemasoknya. IndoGunta, salah satu entitas yang terkait dengan Grup Salim, dan kemungkinan besar merupakan pemasok Indofood, mempunyai tiga pabrik minyak kelapa sawit, dan saat ini sedang membuka hutan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di pulau Papua.

**BEST Indonesia Group** mempunyai tiga pabrik pengolahan dengan total kapasitas keseluruhan sebesar 1,3 juta ton. Perusahaan tersebut juga termasuk dalam urutan 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, dengan produksi CPO tahunan di Provinsi Kalimantan Tengah yang diperkirakan mencapai 700.000 ton. BEST Group membuka hampir 2.300 hektar (ha) lahan gambut untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2019, dan saat ini masih terlibat konflik lahan terkait penanaman yang diduga ilegal di atas 1.800 ha lahan.

**Tunas Baru Lampung**, terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mempunyai kapasitas pengolahan tahunan sebesar 1,3 juta ton. Perusahaan tersebut berencana untuk membuka pabrik pengolahan baru dengan kapasitas tahunan sebesar 750.000 ton pada bulan Oktober 2020. Pabrik baru tersebut, yang secara tajam akan meningkatkan ketergantungan perusahaan ini pada pembelian pihak ketiga, akan lebih banyak melayani pasar biosolar dalam negeri. Produksi CPO Tunas Baru Lampung mencapai 375.000 ton pada tahun 2018. Pada tahun 2019, perusahaan tersebut membuka 2.900 ha lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.

**Darmex Agro** termasuk dalam 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Areal perkebunannya terletak di pulau Sumatera (Riau dan Jambi), dan Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang), dan produksi CPO tahunannya mencapai sekitar 700.000 ton. Kapasitas pengolahannya diperkirakan sebesar 1,6 juta ton per tahun. Pada tahun 2020, Darmex Agro berencana untuk memasok 1,2 milyar liter biosolar (setara dengan 1,1 juta ton CPO) ke pasar dalam negeri di Indonesia. Perusahaan tersebut dianggap tidak transparan dan mempunyai jejak rekam yang buruk dari segi lingkungan dan sosial. Pada bulan Mei 2013, RSPO mengakhiri keanggotaan Darmex Agro. Saat ini,

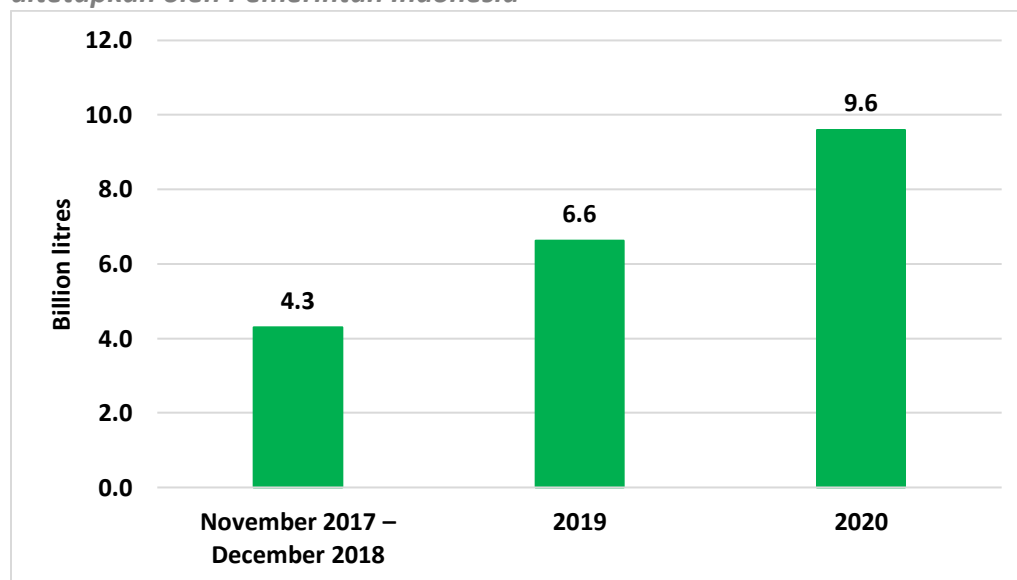
perusahaan pengolahan/dagang NDPE utama hanya membeli sedikit minyak kelapa sawit dari Darmex Agro. Perusahaan ini, bersama dengan pemiliknya, Surya Darmadi, sedang [diselidiki](#) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur Provinsi Riau diduga menerima uang suap sebesar IDR 3 milyar (USD 25.000) pada bulan Februari 2014 dari pihak yang sedang diselidiki.

**Wings Group** dari Indonesia, yang memiliki pabrik di Provinsi Jawa Timur dengan kapasitas pengolahan sebesar 900.000 ton per tahun, lebih banyak bergantung pada pembelian pihak ketiga. Grup perusahaan tersebut telah menanam total areal perkebunan kelapa sawit seluas [33.000](#) ha di pulau Kalimantan. Wings Group juga merupakan pemegang saham yang besar (38 persen) di sebuah perusahaan oleokimia, PT Ecogreen Oleochemicals, dan memiliki perusahaan dagang di Singapura bernama Gideon Agri Pte Ltd. Wings Group telah menerbitkan [kebijakan NDPE](#), namun tidak mengumumkan daftar pabrik maupun daftar pengaduan.

## Biosolar dari kelapa sawit di Indonesia memberikan jalan keluar bagi perusahaan yang mengolah kelapa sawit yang tidak berkelanjutan

Penggunaan biosolar dalam negeri di Indonesia meningkat tajam selama dua tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini. Pada tahun 2020, Indonesia diperkirakan akan menggunakan 9,6 miliar liter biosolar dari minyak kelapa sawit, setara dengan 8,8 juta ton CPO (diperlukan [0,92](#) kilogram CPO untuk menghasilkan satu liter biosolar). Volume ini sama dengan 18 persen dari proyeksi [produksi](#) minyak kelapa sawit Indonesia untuk tahun 2020. Namun, total konsumsi dapat saja lebih rendah akibat dampak virus korona terhadap permintaan transportasi dan perekonomian.

**Gambar 2: Penggunaan biosolar dalam negeri di Indonesia, berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia**



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, alokasi biosolar, [bit.ly/2PvrKxX](#), [bit.ly/34IDgip](#), [bit.ly/2WARP2g](#), [bit.ly/2Ccl3Yu](#), [bit.ly/36qSqGd](#), [bit.ly/2pEaThS](#).



Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Indonesia mengeluarkan sekitar USD 2,1 milyar untuk mendukung sektor minyak kelapa sawit melalui target untuk penggunaan biosolar dalam negeri. Akibatnya, pemerintah menciptakan permintaan tambahan untuk minyak kelapa sawit setelah harga di pasar global menurun karena kelebihan pasokan di industri kelapa sawit.

**Melalui peningkatan penggunaan biosolar dari minyak kelapa sawit, maka Pemerintah Indonesia telah menyediakan jalan keluar bagi perusahaan *leakage* untuk lolos dari pengaruh dan persyaratan perusahaan yang mempunyai kebijakan NDPE.** Pemerintah Indonesia tidak menerapkan kriteria keberlanjutan dalam pemilihan perusahaan pengolahan yang memproduksi biosolar. Pada tahun 2020, perusahaan *leakage* seperti Darmex Agro, Permata Hijau Group, Tunas Baru Lampung dan BEST Industry Group akan memproduksi seperempat dari total volume produksi biosolar. Pada tahun 2020, Darmex Agro akan mengalihkan hampir seluruh kapasitas produksinya pada biosolar, sedangkan Tunas Baru Lampung sedang membangun pabrik pengolahan tambahan (dengan kapasitas produksi sebesar 750.000 ton per tahun) untuk melayani pasar biosolar dalam negeri.

**Gambar 3: Alokasi biosolar kelapa sawit Indonesia untuk tahun 2020**

Grup perusahaan	Menerapkan kebijakan NDPE?	Alokasi (liter x milyar)
Wilmar International	Ya	3,1
Musim Mas	Ya	1,8
Darmex Agro	No	1,2
Royal Golden Eagle	Ya	0,8
Golden Agri-Resources	Ya	0,8
Permata Hijau Group	No	0,6
Louis Dreyfus Company	Ya	0,4
Tunas Baru Lampung	No	0,3
BEST Industry Group	No	0,3
First Resources	Ya	0,3
<b>Total</b>		<b>9,6</b>

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, alokasi biosolar untuk tahun 2020, [bit.ly/2PvrKxX](http://bit.ly/2PvrKxX).

## Kemungkinan pasar *leakage* yang paling besar adalah Tiongkok, India, Indonesia, Pakistan dan Bangladesh

**Negara yang paling banyak mengimpor minyak kelapa sawit olahan dari Indonesia dan Malaysia adalah Tiongkok, India, Pakistan dan Bangladesh,** yang menerima sekitar 43 persen dari seluruh ekspor Indonesia dan Malaysia. Baru sedikit perusahaan di Tiongkok, India, Pakistan dan Bangladesh yang mempunyai kebijakan NDPE, sehingga negara-negara tersebut kemungkinan menjadi pasar tujuan akhir utama untuk ekspor minyak kelapa sawit *leakage*. Di Indonesia, pemerintah lah yang memimpin *leakage*

market (yang sebagian besar terdiri dari minyak goreng) dengan menciptakan pasar untuk biosolar yang diproduksi oleh perusahaan pengolahan non NDPE.

**India baru menambahkan tiga perusahaan pengolahan ke dalam urutan 10 perusahaan pengolahan leakage yang paling besar.** India merupakan [importir](#) CPO yang paling besar di dunia, disusul Uni Eropa di peringkat kedua. Meskipun perusahaan pengolahan besar di Eropa dan para eksportir dengan tujuan negara Eropa telah menerapkan kebijakan NDPE, sebaliknya perusahaan pengolahan di India jarang mempunyai kebijakan tersebut. Perbedaan ini menjelaskan pentingnya perusahaan pengolahan India bagi *leakage market*. Sebagian besar minyak kelapa sawit olahan yang diproduksi oleh perusahaan pengolahan *leakage* di India digunakan untuk konsumsi dalam negeri.

## India mempunyai tiga perusahaan pengolahan leakage yang besar

Sebagaimana dilaporkan oleh CRR pada bulan [November 2018](#), India mempunyai pasar *leakage* besar untuk minyak kelapa sawit. [Data perdagangan](#) menunjukkan bahwa India mengimpor 10,8 juta ton CPO pada tahun 2019, yaitu hampir 15 persen dari seluruh [produksi CPO secara global](#). Dari seluruh CPO yang diimpor oleh India, 71 persen di antaranya digunakan oleh perusahaan pengolahan yang tidak mempunyai kebijakan NDPE.

**Namun, ekspor minyak kelapa sawit leakage ke India mencapai kurang dari 71 persen karena sebagian termasuk dalam kebijakan NDPE perusahaan eksportir Indonesia dan Malaysia.** Dari total impor CPO India yang sebesar 10,8 juta ton, 49 persen diantaranya dilakukan oleh eksportir yang mempunyai kebijakan NDPE, sementara 26 persen tercakup oleh eksportir yang tidak mempunyai kebijakan NDPE. Untuk sisanya yang sebesar 25 persen, cakupan NDPE tidak jelas oleh karena nama eksportir tidak tercantum dalam data perdagangan. Oleh karena itu, maka volume *leakage* pada CPO India berkisar dari 2,8 juta sampai 5,5 juta ton.

Keempat perusahaan pengolahan India yang paling besar adalah Emami Agrotech, Adani Wilmar (termasuk usaha patungannya bersama KTV), Patanjali Ayurved dan Gokul Agro Resources. Secara keseluruhan, keempat perusahaan tersebut mencakup 40 persen impor CPO India pada tahun 2019. Meskipun Adani Wilmar mempunyai kebijakan NDPE, ketiga perusahaan lainnya tidak.

**Gambar 4: India - perusahaan pengolahan terbesar, NDPE dan impor CPO pada tahun 2019**

Perusahaan pengolahan NDPE	% impor CPO tahun 2019	Perusahaan pengolahan non-NDPE	% impor CPO tahun 2019
Adani Wilmar (50:50)	10	Emami Agrotech	12
Bunge	5	Patanjali Ayurved	10
Musim Mas	3	Gokul Agro Resources	6
Cargill	3	Mayur Group	4
Golden Agri-Resources	2	Allana/IFFCO	4
Adani Wilmar / KTV (50:50)	2	Cofco	3
Louis Dreyfus Company	2	Santhoshimathaa	3
Lainnya	1	Edible Group	3



		3F Industries	3
		Lainnya	23
<b>Total</b>	<b>29</b>		<b>71</b>

Sumber: Infodrive, situs web perusahaan. Kode HS 15119020 RBD Palm Olein (Edible Grade) In Bulk dan Kode HS 15111000 Crude Palm Oil (Edible Grade) In Bulk. Pelabuhan: Kandla, Kolkata Sea, Krishnapatnam, Chennai Sea, Kakinada, Nhava Sheva Sea, Mangalore Sea, Tuticorin Sea dan Mundra.

**Emami Agrotech** merupakan perusahaan besar India yang bergerak di bidang barang konsumen. Perusahaan tersebut mempunyai kapasitas pengolahan sebesar 2 juta ton per tahun, kemungkinan termasuk untuk minyak nabati lain selain minyak kelapa sawit. Impor CPOnya mencapai 1,3 juta ton pada tahun 2019. Sebagian penyuplai Emami Agrotech adalah **Posco** dan **Torganda**, perusahaan yang telah terbukti melakukan kegiatan pembukaan hutan, masing-masing di Papua dan Sumatera. Emami Agrotech merupakan anggota RSPO, namun tidak menjual minyak kelapa sawit bersertifikat RSPO **sama sekali** pada tahun 2018.

**Patanjali Ayurved**, yang juga merupakan perusahaan besar India yang bergerak di bidang barang konsumen, mengambil alih perusahaan minyak nabati yang sudah pailit, yaitu Ruchi Soya Industries pada tahun **2019**, termasuk seluruh kapasitas pengolahannya yang sebesar **3,3** juta ton per tahun. Kapasitas tersebut juga digunakan untuk minyak kacang kedelai, minyak bunga matahari dan minyak sesawi. Perusahaan tersebut mengimpor 1,1 juta ton CPO pada tahun 2019, di mana sebagian besar masih masuk di pembukuan Ruchi Soya Industries. Patanjali Ayurved, yang tidak merupakan anggota RSPO, tidak menerbitkan informasi mengenai perusahaan pemasok minyak kelapa sawitnya.

**Gokul Agro Resources** merupakan perusahaan minyak nabati yang mempunyai kapasitas pengolahan sebesar **600.000** ton. Gokul Agro Resources juga merangkap sebagai pedagang minyak kelapa sawit. Perusahaan dagang afiliasinya di Singapura, yaitu Riya International Pte Ltd, mengekspor 275.000 ton CPO ke India pada tahun 2019, di mana 60 persen di antaranya dijual kepada perusahaan pengolahan India selain Gokul Agro Resources. Gokul mengimpor 700.000 ton CPO pada tahun 2019. Perusahaan tersebut menjadi anggota RSPO sejak bulan **September 2019**, namun sampai sekarang belum menerbitkan informasi apapun mengenai pemasok minyak kelapa sawitnya.

**Secara keseluruhan, ketiga perusahaan pengolahan leakage asal India tersebut mengimpor 3,1 juta ton CPO pada tahun 2019, setara dengan 29 persen dari total impor CPO di India.** Selain beberapa perusahaan dagang/pengolahan NDPE kecil yang menjual CPO kepadanya, ketiga perusahaan pengolahan **leakage** tersebut kemungkinan tidak berurusan dengan perusahaan NDPE di rantai pasokan minyak kelapa sawitnya.

## Kebijakan perusahaan pengolahan turut berkontribusi dalam penurunan laju deforestasi

**Kebijakan NDPE perusahaan pengolahan telah berkontribusi pada berkurangnya deforestasi akibat pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, meskipun kontribusinya sulit untuk diukur.** Laju deforestasi menurun di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini. Seiring dengan pelaksanaan NDPE, tindakan dari pemerintah dan harga CPO yang melemah (sebagai akibat dari kelebihan pasokan yang tercipta oleh industri perkelapasawitan) juga **turut berkontribusi** pada berkurangnya tingkat

kehilangan hutan. Dua contoh di bawah ini menggambarkan cara kebijakan NDPE mengurangi deforestasi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan sekaligus membahas keterbatasan NDPE.

### **Di Indonesia, 16 dari 21 perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar mematuhi kebijakan NDPE**

Dari 21 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang paling besar di Indonesia, 13 di antaranya mempunyai kebijakan NDPE dan melaksanakannya secara efektif. Sementara, empat perusahaan perkebunan kelapa sawit lain praktis menghentikan kegiatan pembukaan hutan dan lahan gambut untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, meskipun belum menyatakan komitmennya pada NDPE. Areal tanam milik 16 perusahaan perkebunan tersebut sebesar 19 persen dari total luas areal tanam kelapa sawit di Indonesia yang mencapai [16,3](#) juta ha. Sebagian besar dari 16 perusahaan perkebunan kelapa sawit ini telah membuka hutan dan lahan gambut sebelum pelaku pasar mulai menerapkan kebijakan NDPE.

Dari 21 perusahaan perkebunan kelapa sawit, tujuh di antaranya tidak memiliki fasilitas dan kapasitas pengolahan. Ketujuh perusahaan tersebut adalah KPN Corp, Bumitama Agri, Dharma Satya Nusantara, Triputra Agro Persada, Eagle High Plantations, Makin dan Sampoerna Agro. Perusahaan dagang/pengolahan besar yang mempunyai kebijakan NDPE merupakan pembeli utama bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit ini. Basis pembeli bagi ketujuh perusahaan perkebunan tersebut tercantum di daftar pabrik pemasok yang diterbitkan perusahaan dagang/pengolahan, dan pada pelaporan korporat dari perusahaan perkebunan yang terdaftar di bursa efek ([Dharma Satya Nusantara](#), [Eagle High Plantations](#) dan [Sampoerna Agro](#)). Kemungkinan besar perusahaan-perusahaan ini terpengaruh secara ekonomi oleh perusahaan pengolahan sehingga tidak lagi melakukan kegiatan pembukaan hutan dan lahan gambut.

**Gambar 5: 21 perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dan status NDPEnya**

<b>Kebijakan dan pelaksanaan NDPE</b>	<b>Tidak mempunyai kebijakan NDPE, namun belum membuka hutan atau lahan gambut secara signifikan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit</b>	<b>Tidak ada pelaksanaan NDPE, beresiko besar akan deforestasi</b>
<a href="#">Golden Agri-Resources (GAR)</a> <a href="#">Astra Agro Lestari</a> <a href="#">First Resources</a> <a href="#">Sime Darby</a> <a href="#">KPN Corp (GAMA plantation)</a> <a href="#">Wilmar International</a> <a href="#">Bumitama Agri</a> <a href="#">Royal Golden Eagle (Asian Agri)</a> <a href="#">Musim Mas</a> <a href="#">Kuala Lumpur Kepong</a>	Keluarga Gunawan (Incasi) Triputra Agro Persada Eagle High Plantations Makin Sampoerna Agro	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup Salim BEST Industry Group Darmex Agro Torganda

### Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit masih tetap melakukan deforestasi

Hasil analisis [terbaru](#) oleh CRR menunjukkan bahwa **10 perusahaan minyak kelapa sawit saja yang bertanggung jawab atas deforestasi dan pengembangan lahan gambut di Indonesia yang mencapai sekitar 39.500 ha pada tahun 2019**. Kesepuluh grup perusahaan tersebut adalah: Sulaidy, Jhonlin Group, Mulia Sawit, Indonusa, Rugao Shuangma Group, BEST Group, Peputra Group, Musirawas, Golden Land Bhd dan Tunas Baru Lampung. Informasi di bawah ini memperlihatkan cara yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk tetap melanjutkan kegiatan pembukaan hutan:

- Perusahaan pengolahan *leakage* Tunas Baru Lampung dan BEST Group sudah tidak tercantum lagi di rantai pasokan perusahaan dagang/pengolahan yang mempunyai kebijakan NDPE. Saat ini Tunas Baru Lampung dan BEST Industry Group lebih banyak beroperasi di luar pasar NDPE.
- Sulaidy, Rugao Shuangma Group dan Golden Land belum memiliki pabrik minyak kelapa sawit, sehingga perusahaan dagang/pengolahan yang mempunyai kebijakan NDPE tidak dapat mempengaruhi perusahaan tersebut secara ekonomi. Hingga saat ini masih belum diketahui ke mana tandan buah segar (TBS) dari perusahaan-perusahaan tersebut berakhir.
- Saat ini, Mulia Sawit, Indonusa dan Musirawas dibekukan oleh perusahaan dagang/pengolahan utama setelah melakukan proses *engagement* dengan perusahaan tersebut. Sejak bulan Januari 2019, Wilmar mulai melancarkan program “[Suspend then Engage](#)” atau bekukan baru libatkan. Namun, pada praktiknya, diperlukan waktu lebih dari satu tahun sebelum semua perusahaan dagang/pengolahan utama sempat menyelidiki pengaduan, melakukan diskusi, dan mengambil keputusan mengenai perusahaan perkebunan yang tidak patuh.
- Untuk Jhonlin Group dan Peputra Group, perusahaan dagang/pengolahan utama masih menyelidiki kasus terkait dengan pembukaan lahan. Pada kasus Jhonlin, isunya seputar apakah deforestasi yang dikaitkan dengan perusahaan tersebut disebabkan oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit. Saat ini, Jhonlin juga membuka hutan di areal konsesi lain, yang kemungkinan bertujuan untuk perkebunan kelapa sawit. Kasus Peputra terpusat pada apakah Peputra memegang kendali atas perusahaan yang terlibat pembukaan lahan.

Empat perusahaan yang termasuk dalam daftar 10 perusahaan yang paling banyak melakukan deforestasi pada tahun 2019 juga tercantum pada daftar tahun [2018](#) yang diterbitkan oleh CRR, yaitu: Sulaidy, Jhonlin Group, Mulia Sawit dan Tunas Baru Lampung. Status saat ini untuk keenam perusahaan lain yang tercantum di daftar tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- [BLD Plantation](#) (pada bulan Mei 2019) dan [Austindo Nusantara Jaya](#) (pada bulan Oktober 2019) menandatangani kebijakan NDPE. Namun, kedua perusahaan tersebut belum menyusun rencana pemulihan dalam rangka tindakan kompensasi atas kegiatan pembukaan hutan dan/atau lahan gambut yang telah dilakukan.
- [Keluarga Tee](#) dan HSA Group mengklaim telah menjual areal perkebunan masing-masing di Papua Nugini dan Papua. Penjualan dilakukan setelah proses *engagement* dilakukan oleh perusahaan dagang/pengolahan. Pemilik kedua perusahaan perkebunan tersebut belum diketahui karena

terdaftar di wilayah yurisdiksi yang menjaga kerahasiaan perusahaan. LSM Environmental Investigation Agency (EIA) dan Greenpeace mengajukan pengaduan RSPO terhadap [HSA Group](#) pada bulan Oktober 2018 mengenai pengendalian/kepemilikan dan pengembangan operasional empat perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua. Per bulan April 2020, belum ada kemajuan dalam penyelesaian pengaduan tersebut. Sama halnya dengan BLD Plantation dan Austindo, keluarga Tee family dan HSA Group belum menyusun rencana pemulihan untuk melakukan tindakan kompensasi atas kegiatan pembukaan hutan dan/atau lahan gambut yang telah dilakukan.

- Ciliandry Anky Abadi, yang dimiliki [Martias](#), yaitu mitra usaha Sulaidy, dan merupakan perusahaan afiliasi Sawit Sumbermas Sarana (SSMS), tetap melanjutkan ketidapatuhannya pada kebijakan NDPE pada tahun 2019. Pada umumnya, kedua perusahaan tersebut sudah tidak terlihat lagi di rantai pasokan perusahaan dagang/pengolahan yang mempunyai kebijakan NDPE. Pada sembilan bulan pertama tahun 2019, perusahaan pengolahan baru, yang bernama PT Citra Borneo Utama, membeli [86 persen](#) dari hasil produksi SSMS. Pabrik pengolahan tersebut merupakan pihak yang terkait dengan SSMS.

Klarifikasi: Laporan ini diperbarui pada tanggal 5 Mei dan 2 Juni berturut-turut, untuk menggambarkan perubahan terbaru pada Permata Hijau Group dan FGV Holdings, yang baru-baru ini menerbitkan daftar pemasok dan membuat sistem pengaduan.

**Sanggahan:**

Laporan ini dan informasi yang termuat di dalamnya berasal dari sumber publik terpilih. Chain Reaction Research merupakan proyek lepas dari Climate Advisers, Profundo, dan Aidenvironment (yang secara individu maupun bersama, disebut "Sponsor"). Sponsor percaya bahwa informasi dalam laporan ini berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, namun Sponsor tidak menjamin akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut, yang dapat berubah tanpa pemberitahuan, sehingga apapun yang terdapat dalam dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai jaminan. Pernyataan yang ada mencerminkan penilaian saat ini dari para penulis artikel atau berita terkait, dan belum tentu mencerminkan pendapat Sponsor. Sponsor menyangkal kewajiban, baik secara bersama maupun terpisah, yang timbul atas penggunaan dokumen ini serta isinya. Tidak ada isi apapun yang merupakan atau diartikan sebagai penawaran alat-alat keuangan maupun sebagai nasehat investasi atau rekomendasi dari Sponsor mengenai investasi maupun strategi lain (msl., untuk "membeli", "menjual", atau "memegang" satu investasi atau tidak). Karyawan Sponsor dapat memegang jabatan di perusahaan, proyek atau investasi yang tercakup oleh laporan ini. Tidak ada aspek apapun dari laporan ini yang didasarkan pada pertimbangan terhadap keadaan individu dari suatu investor maupun calon investor. Pembaca perlu menentukan sendiri apakah setuju atau tidak pada isi dokumen ini dan informasi maupun data apapun yang disampaikan oleh Sponsor.